

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN NASIONALISME INDONESIA

Tukiran

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: tukiranump@gmail.com

Abstract

In this article the author promotes a conception of multicultural education and its role for the formation of Indonesian nationalism. Various references indicate that today there are some problems, mainly related to the development of narrow ethnic consciousness in some areas of the country. Not infrequently inter-ethnic relations have led to excessive sentiment in some areas so disrupt national unity built since this nation stands. This phenomenon encourages awareness to make an effort to develop nationalism among the people of Indonesia. In this case, multicultural education can be adopted for the solution of the problem. Multicultural education appropriate to build Indonesian nationalism in the face of global challenges, because it has a core value in the local and global perspectives, namely: (a) piety towards God Almighty, (b) the responsibility of the unitary state, (c) an award, recognition, and acceptance of cultural diversity, (d) uphold the rule of law, and (e) appreciation of human dignity and human rights are universal. The goal of multicultural education is very important for the integration of the nation because it is in line with Indonesian nationalism development efforts to address the challenges of time.

Keywords: nasionalism, multicultural education, higher education

Abstrak

Melalui artikel ini penulis ingin membangun konsepsi tentang pendidikan multikultural dan peranannya dalam pembentukan nasionalisme Indonesia. Berbagai referensi menunjukkan bahwa dewasa ini terdapat beberapa masalah, terutama terkait dengan berkembangnya kesadaran etnis yang sempit di beberapa wilayah negara ini. Tidak jarang hubungan antaretnis menimbulkan sentimen yang berlebihan di beberapa daerah sehingga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun sejak bangsa dan negara ini berdiri. Fenomena seperti ini mendorong kesadaran untuk melakukan suatu upaya guna mengembangkan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan multikultural dapat diadopsi untuk solusi dari masalah tersebut. Pendidikan multikultural tepat untuk membangun nasionalisme Indonesia dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti dalam perspektif lokal maupun global, yakni: (a) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) tanggung jawab terhadap negara kesatuan, (c) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, (d) menjunjung tinggi supremasi hukum, dan (e) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal. Tujuan dari pendidikan multikultural sangat penting bagi integrasi bangsa karena selaras dengan upaya pembangunan nasionalisme Indonesia untuk menghadapi tantangan waktu.

Kata kunci: nasionalism, pendidikan multikultural, pendidikan tinggi

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS al-Hujurat /49:13).

A. Pendahuluan

Keadaan geografi dan demografi Indonesia sebagai negara terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 (menurut hasil penelitian ulang oleh Dinas Hidrohosiografi TNI-AL berjumlah 17.508) pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau besar dan kecil, dengan 6.044 di antaranya memakai nama, dan lain-lain belum dikenal namanya.¹ Data lain menunjukkan bahwa jumlah pulau Indonesia, besar dan kecil, adalah sebanyak 17.670 pulau, dan terdapat kurang lebih 665 bahasa daerah dan 300 suku bangsa.²

Keadaan negara kita yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara merupakan kebanggaan bagi kita. Tetapi jika dilihat dari keragaman suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan kebudayaan, maka masyarakat kita merupakan masyarakat multikultural. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa kita untuk dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, membangun nasionalisme Ke-Indonesia-an dalam masyarakat multikultural seperti di negara kita ini tidak mudah. Lebih-lebih pada era global, masyarakat multikultural membutuhkan pemeliharaan bersama secara terus-menerus serta usaha berkelanjutan yang dinamis. Ia tidak dapat dibiarkan tumbuh begitu saja tetapi juga tidak bisa dijaga hanya oleh kekuasaan belaka.³

Munculnya berbagai konflik horizontal serta tuntutan merdeka dari beberapa daerah, seperti Aceh, Papua, dan Maluku Selatan, memperlihatkan bahwa kita bangsa Indonesia ini sedang menghadapi bahaya disintegrasi nasional dalam tingkat yang cukup parah.⁴ Masyarakat majemuk yang mencoba membangun demokrasi secara lebih baik, akan mengalami masa-masa krisis. Masyarakat yang sedang dalam krisis

biasanya akan kehilangan pegangan, rasa percaya dirinya melemah, kepercayaan kepada pemerintah pun menurun tajam.⁵

Menguat dan melemahnya integrasi nasional di Indonesia, tidak ditentukan hanya oleh perkembangan politik, pertahanan keamanan, ekonomi dan sosial budaya di dalam negeri, tetapi juga oleh perkembangan situasi internasional, khususnya di kawasan terdekat, yakni Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan memiliki kaitan darah, agama maupun bahasa dengan para penduduk di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Papua Niugini. Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya negara-negara tetangga tersebut tentunya akan memberi dampak-dampak positif maupun negatif terhadap integrasi nasional Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya.⁶

Wawasan kebangsaan Indonesia akhir-akhir ini mengalami ujian yang cukup berat. Ikatan-ikatan yang sebelumnya terpatri kuat dalam sebuah titik pandang sama dalam sebuah *nation*, kini berkembang dalam kesadaran etnis sempit yang terus meningkat dan merongrong kewibawaan kebangsaan yang dibangun lebih dari lima puluh tahun yang lalu oleh para *founding father* kita. Bahkan kesadaran etnis tersebut telah mengakibatkan sentimen berlebihan dengan tuntutan merdeka dari beberapa daerah.⁷ Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa kita sebagai negara terkorp nomor satu di Asia dan nomor tiga di dunia, setelah Nigeria dan Kamerun, (*Transparency* Internasional, Kompas, 22 Juli 2000) sebagaimana yang disebutkan di dalam Tabel 1 di bawah ini:

1 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kewiraan untuk Mahasiswa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 19.

2 I Moeis, Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS 05 Agustus 2006, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006, h. 1.

3 A. Priyatno, Hidup Berbangsa & Etika Multikultural, Sambutan, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 6.

4 Cipto, et al, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) , Yogyakarta: LP3 UMY, 2002, h. 167.

5 N. A. Makarim, Karisma dan Krisis. Jakarta: Tempo XXIX: 2000, h. 130-131.

6 I. N. Bhakti, Aspek-aspek Internasional dalam Integrasi Nasional: Suatu Tinjauan Empiris atas Kasus Irian Jaya, dalam Analisis CSIC Tahun XXIII, No.5 September-Oktober 1994, h. 576-584.

7 M. A. Djailil, Menemukan Kembali Kebangsaan Indonesia, dalam M. Bambang Pranowo dan Darmawan (Ed), Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003, h. 5.

Tabel 1
Peringkat Negara Terkorup di Asia⁸

Rank	Negara	Nilai
1	Indonesia	9,92
2	India	9,17
3	Vietnam	8,25
4	Philipina	8,00
5	Cina	7,00
6	Taiwan	5,83
7	Korea Selatan	5,75
8	Malaysia	5,71
9	Hong Kong	3,33
10	Jepang	3,26
11	Singapura	0,90

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada tanggal 14-15 Agustus 2007, tercatat 65,9% responden menyatakan bangga menjadi orang Indonesia. Jumlah ini menurun cukup drastis dibandingkan dengan suara publik lima tahun lalu yang mencapai 93,5%. Penurunan ini diikuti meningkatnya perasaan tidak bangga. Pada tahun 2002, tercatat hanya 5,1% yang menyatakan tidak bangga menjadi warga Indonesia. Pada 2005 meningkat menjadi 23% dan terus meningkat menjadi 23% dan terus meningkat pada tahun ini menjadi 34%. Pendapat tersebut disuarakan secara merata oleh responden dari berbagai kelompok usia.⁹

Suardiman juga menambahkan bahwa pudarnya rasa bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia ini boleh jadi mencerminkan menipisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi negara ini menggerus semangat kebangsaan warga Indonesia. Sumber kekecewaan responden paling banyak bermuara pada persoalan perekonomian serta masalah penegakan hukum di negara ini. Kebobrokan bangsa ini yang paling membuat malu sebagai orang Indonesia, sebanyak 51% responden secara spontan menjawab masalah korupsi dan penanganannya.

Ancaman disintegrasi belakangan ini kembali mengemuka. Sejumlah insiden di beberapa daerah seolah menampar kembali konsepsi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, seperti penyusupan aktivis gerakan RMS dalam peringatan Hari Keluarga XIV di Ambon, penurunan bendera Merah Putih dan pembentukan Partai GAM di NAD.¹⁰

⁸ Suyanto, The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2002, Jawa Pos 11 Maret 2005.

⁹ Suardiman, Jajak Pendapat Nasionalisme di atas Papan Global, Kompas, Sabtu, 18 Agustus 2007, h. 35

¹⁰ Suardiman & Sugihandari, Pidato Kenegaraan Kegundahan Presiden soal Nasionalisme, Kompas, Sabtu, 18 Agustus 2007, h. 5.

B. Nasionalisme Indonesia

Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam kursi utama ideologi nasional.¹¹ Kecuali itu, nasionalisme melalui fasisme di Italia dan Jerman menentang liberalisme pada tahun 1930-an, walaupun dikalahkan oleh liberalisme pada Perang Dunia II. Fasisme sendiri gagal bertahan karena tidak mempunyai doktrin universal seperti liberalisme dan komunisme. Ia menolak keberadaan kemanusiaan bersama atau persamaan hak-hak manusia, dan juga terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legitimasi terutama *masters race* seperti bangsa Jerman untuk memerintah rakyat.¹²

Pengertian kedua istilah di atas (nasionalisme dan bangsa) tentu berkembang. Dalam hal ini, konsep bangsa tampaknya makin lebih kompleks. Seperti yang dinyatakan di atas, sebagaimana liberalisme dan Marxisme, nasionalisme tidak pernah menjadi satu sistem gagasan besar, walaupun pengaruhnya melampaui Marxisme dan Liberalisme seperti tampak dalam sejarah dunia modern. Konon, nyaris semua peperangan dalam abad ke-19 dan abad ke-20 berakar dalam nasionalisme, dan semua negara sekarang merasa berhutang budi kepadanya karena dari gagasan kebangsaan inilah mereka memperoleh legitimasi.

Pandangan lain tentang bangsa dan kebangsaan dapat dilihat dalam cara pembedaan yang dikemukakan oleh Kapoor.¹³ Penulis tersebut membedakan dua istilah ini dalam lima aspek: (1) kebangsaan bersifat subjektif, sedangkan negara bersifat objektif, (2) kebangsaan bersifat psikologis, sedangkan negara bersifat politis, (3) kebangsaan adalah satu keadaan berpikir, sedangkan negara adalah menurut hukum, (4) kebangsaan adalah milik yang bermakna spiritual, sedangkan negara adalah kewajiban yang dipaksakan, dan (5) kebangsaan adalah cara untuk merasakan, berpikir dan hidup, sedangkan negara adalah keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari cara

¹¹ R. Karim, Nasionalisme Arti dan sejarahnya, Analisis CSIS, Tahun XXV Tahun 2, 1996, h. 95-108.

¹² *Ibid*, h. 101.

¹³ *Ibid*.

hidup yang berperadaban.

Santoso mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan kita, disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) koalitas SDM yang masih rendah, (2) militansi bangsa ayang mendekati titik kritis, dan (3) jati diri bangsa Indonesia ayang sudah luntur. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan disintegrasi bangsa dapat menjadi ancaman aktual yang berpengaruh terhadap integritas dan kefaulatan NKRI.¹⁴

Strategi menghadapi tantangan global untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa menurut Santoso adalah: (1) meningkatkan kualitas kepemimpinan, (2) merevitalisasi/ mereaktualisasi nasionalisme, (3) meningkatkan militansi bangsa, (4) meneguhkan jati diri bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini mampu meningkatkan semangat kebangsaan, dan menetralkan nilai-nilai budaya yang kurang mendukung semangat kebangsaan.¹⁵

Upaya untuk mewujudkan integrasi nasional menurut Ubaidillah adalah setali tiga uang dengan upaya membangun kesatuan dan peresatuan bangsa. Diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing, sehingga berbagai prasangka dan *stereotip* yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing

kelompok.¹⁶

Setidaknya terdapat delapan fenomena patologi sosial yang tersisa dari proses transisi, yaitu hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, memudarnya kehidupan kewarganegaraan dan nilai-nilai komunitas, kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat, memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan rasa tolong-menolong, melemahnya nilai-nilai dalam keluarga, praktek korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan.¹⁷ Menurut Suyanto, segala macam patologi sosial dapat dengan mudah dicegah dan diatasi dengan pendidikan yang baik dan berkualitas.¹⁸

C. Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme merupakan sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and culture groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.¹⁹

Pendidikan multikultural tepat untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya, karena pendidikan multikultural dalam kerangka transformatif, menurut Nieto dalam Moeis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengetahuan bukan sesuatu yang netral atau apolitis. Segala sesuatu yang terjadi dalam level kelembagaan memberi bekas lepada proses pembentukan pengetahuan siswa. Terhadap hal ini guru perlu menyadarinya secara utuh.
2. Siswa dididik melihat fenomena kehidupan yang serba beraneka ragam serta berbagai perspektif yang tercakup di dalamnya.
3. Pendidikan multikultural memberi nilai-nilai tinggi tentang keanekaragaman, berpikir kritis, reflektif, dan kecakapan

¹⁶ Ahmad Ubaidillah, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.

¹⁷ Cipto, et. al., Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Yogyakarta: LP3 UMY, 2002, h. ii-v.

¹⁸ Suyanto, Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru, Makalah dalam Seminar PGRI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005. h. 1.

¹⁹ D.T. Sparringa, Multikulturalisme dalam Multiperspektif di Indonesia, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 17.

¹⁴ Dj. Santoso, Ketahanan Negara dan Wawasan kebangsaan Menghadapi Tantangan Global, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional, 19 Mei 2008, Yogyakarta: UGM, Pemd DIY, Kagama, 2008, h. 6.

¹⁵ *Ibid*, h 7.

- tindakan sosial.
4. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pemberdayaan siswa dan juga guru untuk mengambil tindakan-tindakan transformatif berdasarkan pemahaman yang benar tentang hak dan tanggung jawabnya.
 5. Pendidikan multikultural bukan sekedar mengganti satu perspektif tentang kebenaran dengan perspektif lain, tetapi merefleksikan kebenaran itu atas dasar berbagai perspektif yang bahkan saling bertentangan, sehingga dapat memahami realitas secara utuh.
 6. Pendidikan multikultural memungkinkan siswa mengidealkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, tetapi juga mendidik siswa untuk menerima realita nilai tersebut secara kritis.
 7. Pendidikan multikultural dikembangkan berdasarkan sudut pandang dan pengalaman siswa, bukan dari budaya yang sudah mapan.²⁰

Pendidikan multikultural menurut Kellner dirancang untuk mendukung perkembangan keragaman murni dengan memodifikasi kurikulum bidang studi, baik melalui proses penyusunan, pengembangan, maupun pengayaan, yang kesemuanya itu untuk membantu peserta didik dalam memahami sejarah dan kebudayaan bangsa. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan multikultural peserta didik dapat mengenal kebudayaan di negaranya, terlebih-lebih seperti di Indonesia yang memiliki keragaman budaya.²¹

Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi yang produktif atas interaksi di antara elemen-elemen sosial yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berkelanjutan.

Implikasi pemanfaatan perspektif multikultural bagi guru adalah bahwa ia harus berusaha memahami dan memberikan

pelayanan pendidikan kepada bermacam-macam kebutuhan siswa di dalam kelas, dan tidak boleh menyamaratakan begitu saja secara umum, sehingga setiap peserta didik mendapat kesempatan menghayati pengalaman sekolah dari hari ke hari dan memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan psikologisnya sesuai dengan bekal pemahaman kulturalnya menuju kepada kehidupan kolektif sebagai bangsa.²²

Tujuan pendidikan multikultural menurut Moeis meliputi: (1) memperkuat kesadaran multikultural, tanpa kelilangan jatidiri, (2) meningkatkan kecakapan dalam interaksi lintas budaya, (3) menghilangkan stereotipe, stigma, rasa superioritas diri atau kelompok, dan anggapan negatif lain dalam hubungan antarkelompok, (4) memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks dinamika global, (5) menjunjung tinggi supremasi hukum, (6) meningkatkan kecakapan transformasi diri dan sosial melalui tahap-tahap sebagai berikut: (a) mengenali diri, lingkungan, dan sistem yang terkait dengan pola berpikir tentang hubungan antar budaya, (b) mengenali bentuk-bentuk *power* dan kontrol yang mempengaruhi pola berpikir tentang hubungan antarbudaya, (c) menilai pengaruh-pengaruh *power* dan *control* yang muncul dalam pikiran, sikap, dan tindakan tentang hubungan antaretnik, menilai mana pengaruh tersebut yang berguna dalam interaksi antaretnik dan mana yang harus ditinggalkan, serta (d) mengambil tindakan transformatif (diri dan sosial) berdasarkan penilaian yang tepat tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dalam interaksi sosial antarbudaya.²³

Nasikun (dalam Joebagio) menjelaskan bahwa dalam perspektif pembelajaran “sintesis multikultural” memiliki rasional yang paling mendasar yang diidentifikasi ke dalam tiga tujuan, yaitu: (1) *attitudinal*, bahwa pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya yang responsif, serta keahlian untuk melakukan penolakan konflik dan resolusi konflik, (2) *cognitive*, bahwa pendidikan multikultural

20 I. Moeis, Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, tanggal 5 Agustus 2006, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

21 H. Joebagio, Merancang Sejarah yang Multikultural dalam Kurikulum 2004, Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan, November 2005 Tahun XXIV, No.3, 374-366. h. 356.

22 R. Wiriaatmadja, Pendidikan Sejarah di Indonesia Perspektif Lokal, Nasional, dan Global, Bandung: Historia Utama Press, 2002, h. 272.

23 *Ibid*, h. 9.

memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan untuk membangun kesadaran kritis tentang kebudayaannya sendiri, dan (3) *instructional*, bahwa pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi, *stereotype*, peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok etnik dan kultural yang dimuat dalam berbagai buku dan media pembelajaran, menyediakan strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, menyediakan perangkat konseptual untuk melakukan komunikasi kultural, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik evaluasi, dan membantu menyediakan klarifikasi serta penjelasan tentang dinamika perkembangan kebudayaan.²⁴

Pendidikan multikultural sangat tepat untuk membangun nasionalisme keindonesiaan pada era global, karena pendidikan multikultural memiliki nilai inti (*core value*) dalam perspektif lokal maupun global, yakni: (1) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) tanggung jawab terhadap negara kesatuan, (3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, (4) menjunjung tinggi supremasi hukum, dan (5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.²⁵

Pendidikan multikultural ini, walaupun sangat tepat diterapkan di negara kita, namun menurut Sparringa terdapat tantangan, yang meliputi: (1) bagaimanakah masalah kesadaran bersama itu dibangun dalam sebuah ruang yang, di samping memberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi yang serba ragam, juga mengundang elemen-elemen yang berbeda itu untuk menemukan kebutuhan bersama bagi sebuah integrasi di tingkat yang lebih tinggi, (2) proses ini tidak terjadi pada ruang yang terisolasi dari persoalan-persoalan ketidakmerataan, bahkan ketidakadilan,

tentang bagaimana sumber-sumber politik dan ekonomi itu dialokasikan dan distribusikan dalam masyarakat nasional dan internasional, (3) perubahan yang berlangsung di tataran global mendiktekan agenda-agenda politik dan ekonomi baru yang mempersempit kesempatan kita untuk mendefinisikan kembali gagasan-gagasan dasar tentang negara (serba-) bangsa (*the idea of Indonesian (multi-) nation state*) tanpa mengindahkan gagasan-gagasan dan praktik-praktik materialisme-rasional yang dibawa serta oleh ekonomi pasar global.²⁶

Universitas mempunyai tanggung jawab dan peran penting untuk memelihara dan usaha terus menerus mendidik mahasiswa dan masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman, tanpa masing masing identitas budayanya namun sekaligus juga mampu memberi jaminan hidup budaya orang lain.²⁷ Yang lebih penting bagaimana dalam praktek kehidupan perguruan tinggi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan budaya mereka, dan juga adanya upaya perguruan tinggi untuk menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai budaya yang ada di wilayah nusantara ini.

Fungsi dan peran perguruan tinggi sangat strategis dan krusial. Fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tidak saja terfokus hanya pada aspek ekonomi atau politik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran sosio-kulturalnya. Menurut Husin, perguruan tinggi dituntut tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai agen integrasi sosial, yaitu menciptakan identitas budaya bersama, mengarahkan secara bersama-sama individu-individu di kampus dari berbagai kelas sosial, etnik, budaya, kepercayaan, agama dan menghubungkannya ke dalam masyarakat yang lebih luas. Perguruan tinggi harus dapat menjadi perekat bangsa, apalagi dalam suasana ketidakpastian sekarang ini.²⁸

26 D.T. Sparringa, *Multikulturalisme dalam Multiperspektif di Indonesia*, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 18.

27 A. Priyatno, *Hidup Berbangsa & Etika Multikultural*, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 6.

28 Z. Husin, *Etika Multikultural dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Sebuah Catatan Pengantar*, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003, h. 16.

24 H. Joebagio, *Merancang Sejarah yang Multikultural dalam Kurikulum 2004*, *Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan*, November 2005 Tahun XXIV, No.3, 374-366. h. 358.

25 L. Moeis, *Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, tanggal 5 Agustus 2006, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Universitas memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab yang tinggi untuk memelihara secara terus-menerus guna mempersiapkan mahasiswa dan masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman, tanpa menonjolkan masing-masing identitas budayanya, sekaligus juga mampu memberi jaminan hidup budaya orang lain. Oleh karena itu, pendidikan multikultural tepat untuk dipraktikkan pada tingkat perguruan tinggi.
2. Pendidikan multikultural tepat untuk membangun nasionalisme keindonesiaan dalam menghadapi tantangan global, karena memiliki nilai inti (*core value*) dalam perspektif lokal maupun global yakni: (a) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (b) tanggung jawab terhadap negara kesatuan, (c) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya, (d) menjunjung tinggi supremasi hukum, dan (e) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.
3. Pendidikan multikultural mempunyai tujuan yang selaras dengan upaya membangun nasionalisme ke-Indonesia-an dalam menghadapi tantangan global.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Cipto, *et al.*, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: LP3 UMY, 2002.
- Djalil, A. M., "Menemukan Kembali Kebangsaan Indonesia", dalam M. Bambang Pranowo dan Darmawan (Ed), *Reorientasi Wawasan kebangsaan di Era Demokrasi*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.
- Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, *Hidup Berbangsa & Etika Multikultural*, Surabaya: Yayasan Bhakti Persatuan, 2003.
- Hassan, A. *Tafsir Qur'an*. Bangil: Persatuan Islam, 1406 H.
- Hobsbawn, E.J., *Nasionalisme Menjelang Abad*

XXI, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

- Husin, Z., *Etika Multikultural dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Sebuah Catatan Pengantar*, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003.
- Kohn, H., *Nasionalisme Arti dan Sejarah*nya terjemahan Sumantri Mertodipuro, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), *Kewiraan untuk Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Priyatno, A., *Hidup Berbangsa & Etika Multikultural*, Sambutan, Surabaya : Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003.
- Sparringa, D.T., *Multikulturalisme dalam Multiperspektif di Indonesia*, Surabaya: Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya, 2003.
- Ubaidillah, A, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Wiriaatmadja, R., *Pendidikan Sejarah di Indonesia Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*, Bandung: Historia Utama Press, 2002.

B. Makalah

- Moeis, I, *Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS, tanggal 5 Agustus 2006, Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006.
- Santoso, D.J., *Ketabanan Negara dan Wawasan kebangsaan Menghadapi Tantangan Global*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional, 19 Mei 2008, Yogyakarta : UGM,Pemda DIY, Kagama, 2008.
- Suyanto, *Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru*, Makalah dalam Seminar PGRI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005.

C. Jurnal

- Bhakti, I. N, *Aspek-aspek Internasional dalam Integrasi Nasional: Suatu Tinjauan Empiris*

atas Kasus Irian Jaya, dalam *Analisis CSIC Tahun XXIII, No.5 September-Oktober 1994*.

Karim, R, *Nasionalisme Arti dan Sejarah*, Analisis CSIS, Tahun XXV Tahun 2, 1996.

Makarim, N. A, *Karisma dan Krisis*. Jakarta: *Tempo XXIX*, 2000.

Joebagio, H, *Merancang Sejarah yang Multikultural dalam Kurikulum 2004*, dalam *Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan*, November 2005 Tahun XXIV, No.3, 374-366.

D. Surat Kabar

Suwardiman, Jajak Pendapat Nasionalisme di atas Papan Global, *Kompas*, Sabtu, 18 Agustus 2007, halaman 35

Suwardiman & Sugihandari, Pidato Kenegaraan Kegundahan Presiden soal Nasionalisme, *Kompas*, Sabtu, 18 Agustus 2007, halaman 5.

Suyanto, Investasi Pendidikan, *Kedaulatan Rakyat*, Senin 4 Februari, 2008, halaman 1